

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANGLI

Gede Putra Sanjaya¹

I Nyoman Mahaendra Yasa²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail:kupidsanjaya@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Kualitas pelayanan yang diberikan sangat tergantung kepada besarnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Realitanya kemampuan memanfaatkan potensi daerah di dalam era otonomi daerah tidak sama di semua daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangli. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh dari PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Regresi linear berganda digunakan di dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan semua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kemudian Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap PAD, selanjutnya Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap PAD, dan Jumlah Wisatawan tidak berpengaruh positif serta tidak signifikan secara parsial terhadap PAD Kabupaten Bangli Periode Tahun 1994-2016.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan.

ABSTRACT

The performance of regional development can be seen from quality of services provided by local government to community. The quality of service provided depends on the size of budget owned by local government. The reality of ability to exploit regional potential in era of regional autonomy is different in all regions. This research was conducted in Bangli Regency. The purpose is to analyze the influence of GDRP, Total Population, and Number of Travelers to Original Local Government Revenue (OLGR), either partially or simultaneously. This study uses secondary data with quantitative method. The analysis technique used is multiple linear regression. Based on the result of research indicates that the variable of GRDP, Total Population, and Number of Tourist have significant influence simultaneously to OLGR. Then the GDRP variable has a positive and significant effect partially to OLGR, then the number of residents has positive and not significant effect partially to OLGR and the number of tourists negatively and not significantly partially to OLGR of Bangli regency for period of 1994-2016.

Keywords: Original Local Government Revenue, Gross Domestic Regional Product, Total Population, and Number of Tourists.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perkembangan pembangunan. Untuk itu harus diperlukan otonomi daerah dalam pembiayaan pembangunan, dalam rangka menyukseskan pembangunan. Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat terhadap daerah dapat memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi (Zouheir, 2012). Namun, didalam menjalankan otonomi daerah, hal yang terpenting adalah mengetahui potensi daerah yang dimiliki (Kesuma, 2015). Segala sumber penerimaan harus dimaksimalkan untuk membiayai pembangunan. Menurut Fajrii dkk (2016), keterbukaan suatu perekonomian daerah dapat mencerminkan kebijakan otonomi.

Hakikat otonomi daerah merupakan hak penuh dalam mengatur dan menjalankan sendiri bagian dan wewenangnya, karena itu otonomi daerah yang ideal memerlukan keleluasaan pada berbagai hal (Jaya dan Widanta, 2014). Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang pusat ke daerah (*Subnational Jurisdictions*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintah otonomi daerah di sini bukan pendelegasian wewenang melainkan pemberian atau pelimpahan wewenang, dengan demikian penerima wewenang bertanggung jawab penuh untuk mengatur dan menjalankan sesuai dengan cara yang berbeda.

Menurut Saragih (2003: 83), desentralisasi fiskal secara singkat berarti suatu proses distribusi anggaran yang berasal dari tingkat pemerintahan lebih tinggi pemerintahan di bawahnya, guna memperbaiki fungsi dan tugas pemerintah serta

pelayanan publik berdasarkan banyaknya tugas bidang pemerintah yang melimpahkan. Salah satu pertanyaan penting adalah apakah desentralisasi di Indonesia telah tercapai (Irawan, 2014). Desentralisasi telah mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Hendra, 2016).

Mahmudi (2010:142) ukuran derajat desentralisasi dikalkulasipada perbandingan jumlah Pendapatan Asli daerah dan total penerimaan daerah. Pemerintah sebagai pondasi untuk mempercepat proses desentralisasi (Miranti dkk, 2014). Rasio tersebut memperlihatkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Apabila kontribusi PAD tinggi maka kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi cenderung tinggi. Rasio tersebut dirumuskan seperti dibawah ini.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Dari Tabel 1 derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Badung paling tinggi dari tahun ke tahunnya melebihi derajat desentralisasi fiskal di Provinsi Bali yaitu di atas 60,148 persen, yang berarti derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Badung sangat baik. Sebaliknya, di Kabupaten Bangli rata-rata derajat desentralisasi fiskalnya sebesar 9,015 persen yang dibawah 10,00 persen menandakan sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kontribusi pajak di sektor pariwisata, yang dimana sektor tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli.

Tabel 1 Derajat Desentralisasi Fiskal di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dari Tahun 2012-2016 (%)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Jembrana	7,173	9,188	10,851	10,848	10,501	9,712
Tabanan	17,352	20,384	20,000	18,164	17,724	18,724
Badung	71,416	77,136	78,688	80,357	82,332	77,985
Gianyar	29,378	27,738	30,299	29,501	31,487	29,680
Klungkung	8,227	9,474	11,950	13,232	13,102	11,197
Bangli	7,262	7,973	9,593	10,043	9,846	9,051
Karangasem	15,878	16,192	19,178	17,777	15,047	16,814
Buleleng	10,782	11,526	14,231	15,122	13,652	13,062
Denpasar	37,078	42,580	40,435	43,451	39,321	40,573
Provinsi Bali	56,21	61,57	63,80	61,22	57,94	60,148

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017(data diolah)*

Menurut Stice dkk (2010: 161), pendapatan merupakan alur kas dari barang yang dikirim maupun diproduksi, pemberian jasa atau aktivitas lainnya. PAD dan sumber pendukungnya selalu menjadi isu yang problematik, tidak saja di masa lampau, tetapi juga di masa sekarang tatkala otonomi daerah menjadi tuntutan untuk dikembangkan secara optimal. Menurut Emmerson (2001), sejak awal orde baru, kekerasan melandasi langkah-langkah sentralisasi. Ruang yang diberikan pada aparat di daerah untuk mengurus daerahnya sangatlah sempit, bahkan seringkali potensi yang terdapat di suatu daerah tersentral pada pusat, akibatnya terjadi adalah eksploitasi pusat terhadap daerah tanpa mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan daerah itu sendiri. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, baik dari segi pembangunan, akses informasi terutama kemakmuran masyarakatnya.

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah)

Kabupaten/	2012	2013	2014	2015	2016
Jembrana	46.470	68.485	89.349	98.032	114.533
Tabanan	183.295	255.418	273.426	300.799	318.083
Badung	1.870.187	2.279.113	2.722.625	3.001.464	3.563.459
Gianyar	261.222	319.612	424.472	457.321	529.864
Klungkung	48.561	67.402	98.837	120.035	134.772
Bangli	40.751	55.986	76.141	87.731	102.437
Karangasem	144.019	168.653	239.425	243.125	233.653
Buleleng	129.003	160.292	219.682	293.038	282.113
Denpasar	511.326	658.975	698.705	776.211	740.366
Provinsi	2.042.091	2.529.976	2.920.416	3.041.266	3.041.195

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017*

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi perkembangan PAD di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah di Provinsi Bali. PAD sendiri dipengaruhi perkembangan ekonomi daerah, karena apabila PAD di suatu daerah tinggi hal tersebut dikarenakan perekonomian daerah yang meningkat dan stabil. Ketika perekonomian meningkat dan stabil maka kegiatan usaha akan semakin beragam, dengan demikian penerimaan pajak akan semakin meningkat dan penerimaan PAD juga semakin meningkat.

Tujuan di dalam membangun pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu didalam pembangunan haruslah dicermati sebagai proses terjadinya sebuah pertumbuhan yang baik secara kesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

Tabel 3 PDRB riil dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangli Tahun 1994-2016

No	Tahun	PDRB (dalam juta rupiah)	Perkembangan (%)
1	1994	303.355	66,99
2	1995	324.219	6,43
3	1996	347.423	6,67
4	1997	361.789	3,97
5	1998	353.081	-2,46
6	1999	354.692	0,45
7	2000	363.296	2,36
8	2001	750.435	51,58
9	2002	773.161	2,93
10	2003	799.298	3,26
11	2004	831.519	3,87
12	2005	868.617	4,27
13	2006	905.544	4,07
14	2007	946.113	4,28
15	2008	984.129	3,86
16	2009	1.040.363	5,40
17	2010	1.092.116	4,73
18	2011	1.155.898	5,51
19	2012	3.097.058	62,67
20	2013	3.281.161	5,61
21	2014	3.472.216	5,50
22	2015	3.687.996	5,85
23	2016	3.917.962	5,86
Rata-rata		1.304.775	11,45

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017*

Keberhasilan dari suatu pembangunan di suatu wilayah dapat diamati dengan salah satu indikator makro, dimana indikator tersebut salah satunya dapat di analisis melalui PDRB yang merupakan suatu nilai tambah yang berasal dari kegiatan di suatu daerah. PDRB yang dipengaruhi oleh sektor ekonomi memiliki peran yang sangat penting didalam laju pertumbuhan ekonomi (Suryahadi dkk, 2012). Peningkatan pada

PDRB merupakan suatu bentuk dari berhasilnya suatu pembangunan (Suartha dan Murjanayasa, 2017). Gambaran data pertumbuhan (PDRB) riil atas harga konstan di Kabupaten Bangli ditunjukkan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat PDRB mengalami peningkatan dari tahun 1994-2016 dengan rata-rata 1.304.775. Melihat kondisi tersebut pemerintah harus dapat mempertahankan kondisi tersebut sehingga PDRB Kabupaten Bangli terus mengalami peningkatan dengan rata-rata perkembangan 11,45 persen. Peningkatan PDRB akan mencerminkan bahwa perekonomian di suatu daerah tersebut bagus, sehingga nantinya orang akan cenderung berinvestasi di Kabupaten Bangli, dengan meningkatnya investasi tentu saja pajak yang diperoleh akan meningkat, dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Perbedaan dari kelahiran dan kematian tersebut (*reproductive change*) perubahan reproduktif atau (*natural increase gration*) disebut imigrasi neto (Lembaga Demografi FE UI, 2000:5).. Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangli cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya, yang dimana perkembangan rata-ratanya sebesar 0,98 persen.

Tabel 4 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 1994-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Perkembangan (%)
1	1994	188.307	1,19
2	1995	190.329	1,06
3	1996	194.577	2,18
4	1997	195.420	0,43
5	1998	178.631	-0,93
6	1999	153.924	-16,05
7	2000	155.293	0,88
8	2001	198.833	21,89
9	2002	199.268	0,21
10	2003	209.241	4,76
11	2004	210.103	0,41
12	2005	211.186	0,51
13	2006	212.014	0,39
14	2007	212.926	0,42
15	2008	213.808	0,83
16	2009	214.785	0,45
17	2010	215.729	0,43
18	2011	216.017	0,10
19	2012	216.804	0,36
20	2013	220.000	1,45
21	2014	221.300	0,59
22	2015	222.600	0,58
23	2016	223.800	0,53
Rata-rata		203.256	0,98

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017*

Berdasarkan Tabel 4 jumlah penduduk di Kabupaten Bangli mengalami penurunan sebesar 16.789 di tahun 1998, kemudian mengalami penurunan lagi sebesar 24.707 di tahun 1999, dan kembali meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata perkembangan 0,98 persen. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk

menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan akan konsumsi barang dan jasa dari masyarakat dan ketika konsumsi akan barang dan jasa meningkat tentu saja produsen akan menambah produksinya, sehingga peningkatan pajak terjadi karena bertambahnya barang produksi dari produsen yang nantinya menambah Pendapatan Asli Daerah.

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2016*

Berkembangnya pariwisata berpengaruh pada kondisi atas sosial ekonomi masyarakat, di antaranya ialah dampak pariwisata pada pendapatan dari pemerintah (Cohen, 1984). Provinsi Bali yang dikenal untuk tujuan wisata, pariwisata yang menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali (Oka, 2015). Kabupaten Bangli sendiri memiliki objek pariwisata yang cukup beragam seperti Gunung Batur, Danau Batur, dan masih banyak yang lainnya.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bangli di tahun 1997 sebanyak 799.586 orang, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 1999 yaitu sebanyak 443.350 orang, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangli terus berfluktuasi hingga tahun 2009, dan kembali mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2016 dengan rata-rata perkembangan -8,99 persen. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung di Kabupaten Bangli dari tahun 1994-2016 lebih banyak dari jumlah wisatawan domestik. Jumlah kunjungan wisatawan akan sangat berdampak terhadap pendapatan hotel dan restaurant, ketika jumlah wisatawan meningkat dari tahun 2010 sampai 2016 hal tersebut akan berdampak positif terhadap hotel dan restaurant sehingga dari peningkatan jumlah wisatawan juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Wisatawan di

Kabupaten Bangli cenderung berfluktuasi, dimana Jumlah Wisatawan tersebut beragam, mulai dari wisatawan domestik maupun mancanegara.

Tabel 5 Jumlah Wisatawan Kabupaten Bangli dari Tahun 1994-2016

No	Tahun	Wisman (orang)	Wisnus (orang)	Jumlah Wisatawan (orang)	Perkembangan (%)
1	1994	604.516	154.588	759.104	1,19
2	1995	559.592	139.732	699.324	-8,54
3	1996	650.610	158.074	808.684	13,52
4	1997	618.630	180.956	799.586	-1,13
5	1998	410.552	102.386	512.938	-5,58
6	1999	343.941	99.409	443.350	-1,56
7	2000	402.100	100.536	502.636	11,79
8	2001	471.499	117.873	589.372	14,71
9	2002	256.893	64.231	321.124	-83,53
10	2003	912.172	226.162	1.138.334	71,79
11	2004	235.321	58.826	294.147	-286,99
12	2005	252.850	63.213	316.063	6,93
13	2006	186.405	46.603	233.008	-35,64
14	2007	255.887	62.972	318.859	26,92
15	2008	315.746	78.936	394.682	19,21
16	2009	386.705	96.676	483.381	18,34
17	2010	326.549	91.594	418.143	-15,60
18	2011	327.177	161.756	488.933	14,47
19	2012	346.494	201.658	548.152	10,80
20	2013	394.206	222.431	616.637	11,10
21	2014	447.199	200.408	647.607	4,78
22	2015	451.133	159.216	610.349	-6,10
23	2016	459.120	236.003	695.123	12,19
Rata-rata		338.390	131.488	549.545	-8,99

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017*

Secara teoritik, PAD adalah kontribusi yang masyarakat berikan untuk mendorong status otonom daerahnya. Dukungan yang berwujud besarnya perolehan PAD penting bagi pemerintah daerah supaya lebih leluasa dalam menjalankan pemerintahan (Lutfi, 2006).

Tabel 6 PAD di Kabupaten Bangli Tahun 1994-2016

No	Tahun	PAD (dalam ribu rupiah)	Perkembangan (%)
1	1994	1.906.714	34,23
2	1995	2.236.466	14,74
3	1996	2.652.067	15,67
4	1997	2.652.067	0
5	1998	2.456.120	-7,97
6	1999	2.175.429	-12,90
7	2000	3.180.000	31,59
8	2001	5.049.018	37,01
9	2002	7.759.629	34,93
10	2003	5.602.020	-38,51
11	2004	7.395.415	24,25
12	2005	6.713.109	-10,16
13	2006	9.413.110	28,68
14	2007	11.214.406	16,06
15	2008	12.655.751	11,30
16	2009	16.329.747	22,49
17	2010	16.252.951	-0,47
18	2011	22.961.237	29,21
19	2012	40.751.049	43,65
20	2013	55.986.570	27,21
21	2014	76.141.461	26,47
22	2015	87.731.141	13,21
23	2016	102.437.764	14,35
Rata-rata		21.802.489	15,43

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017*

Berdasarkan Tabel 6 PAD di Kabupaten Bangli mengalami penurunan di tahun 2003 yaitu yang awalnya Rp.7.759.629.000,00 menjadi Rp.5.602.020.000,00 kemudian meningkat kembali sampai tahun 2016. Rata-rata PAD Kabupaten Bangli dari tahun 1994-2016 yaitu sebesar Rp.24.733.101.000,00. Melihat kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Bangli dirasakan perlu untuk lebih mengoptimalkan

penerimaan PAD mengingat sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat dirasakan semakin ketat di era otonomi ini, maka upaya untuk meningkatkan PAD merupakan keharusan bagi daerah untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan dan otonomi daerah.

METODOLOGI

Pendekatan kuantitatif dengan bentuk asosiatif yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangli. Dipilihnyalokasi Penelitiandi Kabupaten Bangli karena diperoleh data penerimaan PAD di seluruh kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Bangli memiliki PAD terendah di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. PDRB , Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan menjadi varibel bebas. Sedangkan yang menjadi variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Analisis linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan, Berikut bentuk umum dari model regresi linear berganda.

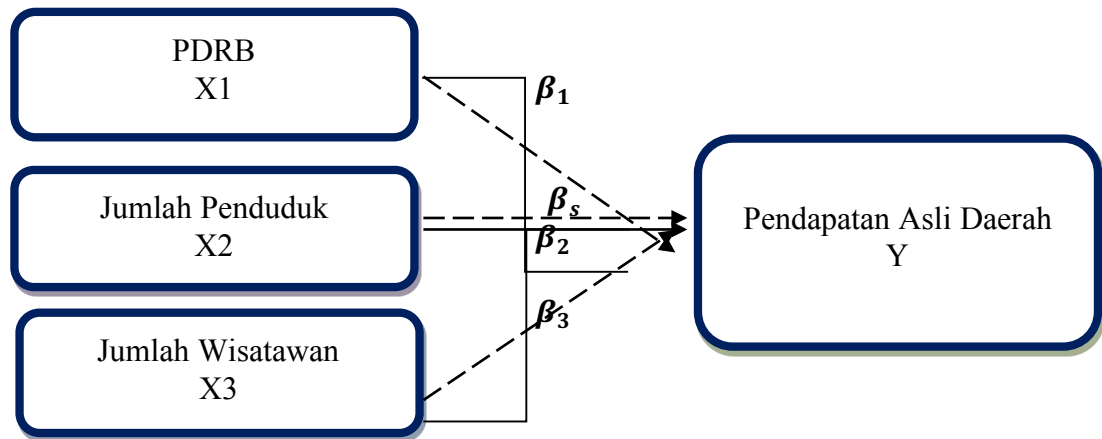
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y_i = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli
- X_1 = PDRB
- X_2 = Jumlah Penduduk
- X_3 = Jumlah Wisatawan
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- β_0 = Intersep (konstanta)
- μ_i = Tingkat Kesalahan (gangguan)

dalam teknik analisis ini variabel yang digunakan harus bebas dari gejala multikolinearitas, autokolerasi, normalitas, dan heteros kedastisitas, maka dari itu pengujian uji asumsi klasik diperlukan dengan menggunakan program SPSS.

penelitian ini merumuskan kerangka konsep penelitian sebagai berikut.



Keterangan :

-----> : Pengaruh secara parsial X_1, X_2, X_3 , terhadap Y

————> : Pengaruh secara simultan X_1, X_2, X_3 , terhadap Y

Gambar 1 Hubungan Antar Variabel Penelitian

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini disajikan data hasil penelitian, yang kemudian dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang dipilih untuk mencapai tujuan rumusan sebelumnya.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil sebesar $0,914 > 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal.

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Unstandardized Residual	
N	23
Kolmogorov-Smirnov Z	,559
Asymp. Sig. (2-tailed)	,914

Sumber: *Data diolah menggunakan SPSS*

2) Uji multikolinearitas

Suatu model yang diregresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linear, dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variabel. Model regresi sebaiknya tidak berkorelasi di antara variabel independen. Cara mencari tahu ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (TOL), jika $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas (Priyanto, 2013: 56).

Tabel 8 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients^a	
		Collinearity Statistics Tolerance VIF
1	LnPDRB	.430 2.324
	LnJumlahPenduduk	.429 2.330
	LnJumlahWisatawan	.996 1.004

Sumber: *Data diolah menggunakan SPSS*

Tabel 8 menunjukkan *Tolerance* (TOL) > 0,1 serta VIF < 10, berarti tidak terjadi Multikolinearitas.

3) Uji autokorelasi

Guna mencari tahu tidak adanya autokorelasi yaitu dengan melakukan Uji Durbin-Watson (DW). Hasil menunjukkan bahwa nilai DW senilai 1,685. Nilai $d_U(1,66) < DW(1,685) < 4 - d_U(2,34)$, dimana tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 9 Uji Autokorelasi

Model Summary	
Durbin-Watson	1.685

Sumber: *Data diolah menggunakan SPSS*

4) Uji heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan Uji *Glejser*, dengan ketentuan jika nilai signifikan di atas 0,05 maka memiliki arti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 10 Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	.732
1 LnPDRB	.455
LnJumlahPenduduk	.849
LnJumlahWisatawan	.763

Sumber: *Data diolah menggunakan SPSS*

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari Teknik analisis ini untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, JumlahPenduduk, dan Jumlah Wisatawan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli tahun 1994-2016.

Tabel 11 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

coefficients ^a					
Mosdel	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
Constant	-4.571	8.717		-.524	.606
LnPDRB	1.468	.093	.978	15.795	.000
LnJumlahPenduduk	.091	.765	.007	.119	.906
LnJumlahWisatawan	-.045	.135	-.013	-.331	.745
<i>R</i>	0,984				
<i>R</i> ²	0,969				
Adjusted <i>R</i> ²	0,964				
Fhitung	189,658				
Sig F	0,000				

Sumber: *Data diolah menggunakan SPSS*

Berikut persamaan regresi yang dapat dituliskan:

$$\begin{aligned}
 \text{Ln}\hat{Y} &= -4,571 + 1,468 \ln X_1 + 0,091 \ln X_2 - 0,045 \ln X_3 \\
 \text{Se} &= 8,717 \quad 0,093 \quad 0,765 \quad 0,135 \\
 t &= -,524 \quad 15,795 \quad 0,119 \quad -0,331 \\
 \text{Sig} &= 0,606 \quad 0,000 \quad 0,906 \quad 0,745 \\
 R^2 &= 0,969 \\
 F &= 0,000
 \end{aligned}$$

Interpretasi Koefisien Regresi:

$\beta_0 = -4,571$ artinya apabila variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan adalah konstan pada angka 0 (nol), Pendapatan Asli Daerah negatif sebesar 4,571 persen.

$\beta_1 = 1,468$, Artinya jika PDRB naik 1 persen dan variabel yang lain konstan, mengakibatkan PAD akan positif sebesar 1,468 persen.

$\beta_2 = 0,091$, Artinya jika Jumlah Penduduk bertambah 1 persen dan variabel lain konstan, mengakibatkan PAD positif sebesar 0,091 persen.

$\beta_3 = -0,045$, Artinya jika Jumlah Wisatawan bertambah 1 persen dan variabel lain konstan, mengakibatkan PAD negatif sebesar 0,045 persen.

Berdasarkan hasil regresi di atas, dapat diketahui R^2 adalah 0,969, berarti PAD dapat dijelaskan oleh variabel dari PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan sebesar 96,9 persen, sisanya 3,1 persen ($100 \text{ persen} - 96,9 = 3,1 \text{ persen}$) dijelaskan faktor lain diluar dari model penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil SPSS, diperoleh bahwa signifikansi F 0,000 lebih kecil daripada 0,05, semua variabel berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil SPSS, diperoleh bahwa signifikansi variabel PDRB 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dengan meningkatnya PDRB menunjukkan peningkatan perekonomian pada daerah tersebut. Meningkatnya PDRB tentu saja akan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli, karena peningkatan PDRB akan mencerminkan bahwa perekonomian di suatu daerah tersebut bagus, sehingga nantinya orang akan cenderung berinvestasi di Kabupaten Bangli, dengan meningkatnya investasi tentu saja pajak yang diperoleh akan meningkat, dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sektor-sektor pada PDRB tersebut ada yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak daerah sehingga dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah pada sektor-sektor tersebut. Dengan meningkatnya PDRB pada sektor-sektor tersebut maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah pada sektor yang bersangkutan, tingginya tingkat ekonomi maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi maka kesadaran masyarakat akan membayar pajak juga akan meningkat dan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan sarana dan prasarana barang publik yang lebih baik. Selanjutnya akan memaksa Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara menarik pajak yang lebih tinggi agar dapat memenuhi permintaan atas barang publik.

Hasil SPSS, diperoleh bahwasignifikansi variabel Jumlah Penduduk 0,906yang dimana lebih besar dari 0,05, berarti Jumlah Penduduk tidak memberikan berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah.Hal tersebut didukung oleh adanya Piutang Pajak Air Tanah dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 12 Piutang Pajak Air Tanah dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bangli Tahun 2014-2016 (dalam rupiah)

No	Tahun	Piutang Pajak Air Tanah	Piutang PBB
1	2014	88.335.901,00	14.515.917.737,00
2	2015	107.950.088,00	24.568.614.652,00
3	2016	104.567.713,00	25.833.061.993,00
Rata-rata		100.284.567,00	21.639.198.127,33

Sumber: *BKPAD Kabupaten Bangli, 2017*

Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat adanya piutang Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Bangli. Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp.88.335.901,00 di tahun 2014, kemudian Rp.107.950.088,00 di tahun 2015, dan Rp.104.567.713,00 di tahun 2016 dengan rata-rata sebesar Rp.100.284.567,00. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.14.515.917.737,00 di tahun 2014, kemudian Rp.24.568.614.652,00 ditahun 2015, dan Rp.25.833.061.993,00 ditahun 2016 dengan rata-rata sebesar Rp.21.639.198.127,00. Adanya piutang tersebut mengakibatkan kenaikan Jumlah Penduduk tidak dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli karena banyak pendapatan yang bersumber dari pajak ini tidak dapat ditagih

Tabel 13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jembrana	67,94	68,39	68,67	69,66	70,38
Tabanan	71,69	72,31	72,68	73,54	74,19
Badung	77,26	77,63	77,98	78,86	79,80
Gianyar	73,36	74	74,29	75,03	75,70
Klungkung	67,64	68,08	68,30	68,98	69,31
Bangli	64,53	65,47	65,75	66,24	67,03
Karangasem	62,95	63,70	64,01	64,68	65,23
Buleleng	68,29	68,83	69,19	70,03	70,65
Denpasar	80,45	81,32	81,65	82,24	82,58
Rata-rata	70,45	71,08	71,39	72,14	72,76

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017*

Nilai IPM Kabupaten Bangli yang dari tahun-ketahunnya dibawah rata-rata kabupaten/kota yang ada di Bali, hal tersebut akan membuat kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bangli masih kurang, dengan kurangnya kualitas sumber daya yang kurang, maka tentu saja sumber daya manusia tersebut kurang potensial, yang mengakibatkan kurangnya kemandirian SDM, sehingga tidak akan berkontribusi terhadap pajak dari SDM tersebut yang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk tidak dapat mempengaruhi kenaikan PAD

Hasil SPSS, diperoleh bahwasignifikansi variabel Jumlah Wisatawan 0,745yang dimana lebih besar dari 0,05, makaJumlah Wisatawan tidak memberikan berpengaruhsignifikan pada Pendapatan Asli Daerah.Ketika Jumlah Wisatawan Meningkat Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat apabila wisatawan tersebut makan di Restoran dan Menginap di Hotel yang ada di Kabupaten Bangli. Dari data

yang diperoleh, bahwa Wisatawan yang menginap di Kabupaten Bangli rata-ratanya hanya 1,47 hari dalam sepuluh tahun terakhir di Hotel Non Bintang yang tentu saja tidak memberi kontribusi yang besar terhadap PAD, oleh karena itu perlu ditingkatkan pelayanan maupun kualitas di objek wisata sehingga, wisatawan yang berkunjung akan nyaman dan memutuskan untuk tinggal lebih lama di Kabupaten Bangli.

Tabel 14 Rata-rata Lama Tamu Menginap pada Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya di Kabupaten Bangli dari Tahun 2007-2016 (dalam hari)

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017*

Selanjutnya Pendapatan Asli daerah akan meningkat dari adanya PHR di Kabupaten Bangli, apabila PHR tersebut dilaporkan dan di bayar setiap bulannya oleh Hotel dan Restoran yang bersangkutan kepada BKPAD Kabupaten Bangli. Namun dari data yang diperoleh di BKPAD Kabupaten Bangli, ternyata ada Piutang Pajak Hotel

No	Tahun	Rata-rata Tamu Menginap
1	2007	1,58
2	2008	1,57
3	2009	1,45
4	2010	1,88
5	2011	1,71
6	2012	1,58
7	2013	1,36
8	2014	1,33
9	2015	1,08
10	2016	1,20
Rata-rata		1,47

Dan Restoran, yang dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 830.718.178,11, di tahun 2014 sebesar Rp. 844.512.614,71, kemudian di tahun 2015 sebesar Rp. 891.521.335,29, dan di tahun 2016 sebesar Rp. 198.567.733,24, dengan rata-rata sebesar Rp. 691.329.965,33.

Tabel 15 Piutang Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bangli dari Tahun 2013-2016 (dalam rupiah)

No	Tahun	Restoran	Hotel	Rumah Makan	Total
1	2013	725.444.993,73	57.641.834,83	47.631.350,00	830.718.178,11
2	2014	720.234.704,23	78.235.190,48	46.033.720,00	844.512.614,71
3	2015	752.055.996,13	88.079.919,16	51.385.420,00	891.521.335,29
4	2016	96.850.238,85	66.573.300,00	34.535.186,50	198.567.733,24
Rata-rata		573.646.483,23	72.673.561,11	44.896.419,12	691.329.965,33

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017*

Adanya piutang PHR tersebut tentunya akan membuat Pendapatan Asli Daerah berkurang dikarenakan akan terjadi ketimpangan antara target pajak dengan realisasinya. Jumlah Wisatawan yang semakin banyak dengan tidak diiringi dengan komitmen oleh pemilik dari Hotel dan Restoran untuk membayarkan ke BKPAD tentu saja tidak akan memberi dampak yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dari pembahasan, kesimpulan yang didapat dari penelitian iniyaitu.

- 1) Variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap PAD Kabupaten Bangli periode tahun 1994-2016. Apabila PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan terus mengalami peningkatan di tahun yang akan datang maka, Pendapatan Asli

Daerah yang diperoleh akan terus meningkat seiring meningkatnya PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan.

- 2) Variabel PDRB memiliki pengaruh yang positif serta signifikan secara parsial pada Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk member pengaruh positif yang tidak signifikan secara parsial pada Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Wisatawan tidak member pengaruh positif serta tidak signifikan secara parsial pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Periode Tahun 1994-2016. Apabila Jumlah Penduduk yang meningkat diiringi dengan ketaatan membayar pajak dan IPM yang tinggi, kemudian ketaatan membayar pajak oleh hotel dan restoran dari kunjungan wisatawan, maka di tahun yang akan datang jumlah penduduk akan berpengaruh signifikan terhadap PAD, dan Jumlah Wisatawan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan sertasimpulan, sehinggadapat deberikan saran sebagai berikut.

- 1) PDRB merupakanukurandari pertumbuhan ekonomi oleh karena itu sangat penting dilakukan pemerataan di sektor unggulan, sehingga nantinya dapat berkontribusisecara maksimal pada pendapatan asli daerah. Untuk itu, sangat perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap sektor pada potensi-potensi tersebut.
- 2) Jumlah penduduk yang semakin tinggi memberikan suatu kontribusi yang tinggi pula pada Pendapatan Asli Daerah, apabila nilai IPM di atas rata-rata dari kabupaten/kota yang ada di Bali dan penduduk tersebut taat membayar pajak. Nilai IPM yang dibawah rata-rata mengakibatkan SDM menjadi kurang berkualitas dan adanya piutang pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan tentu saja membuat PAD berkurang, oleh karena ituIPM harus ditingkatkan lagi dan Pemerintah Daerah selaku badan yang terkait perlu bertindak tegas dengan memberikan peringatan maupun sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga PAD akan meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk.
- 3) Banyaknya Jumlah Wisatawan yang berkunjung seharusnya memberikan dampak positif bagi PAD, apabila wisatawan tersebut tinggal lama di Kabupaten Bangli, sehingga dari lama tinggal tersebut membuat wisatawan harus makan di restoran yang membuat PHR yang didapat semakin tinggi. Rata-rata lama tamu menginap di hotel non bintang hanya 1,47 hari, dengan demikian Pemerintah Daerah selaku

badan yang terkait perlu memperbaiki pelayanan publik serta sarana maupun prasarana, sehingga wisatawan akan nyaman untuk tinggal lebih lama. Pemerintah Daerah juga perlu bertindak tegas dengan memberikan peringatan maupun sanksi terhadap hotel dan restoran yang tidak membayar pajak, dikarenakan hotel dan restoran tersebut hanya sebagai perantara dari pengunjung yang membayar PHR, sehingga dengan demikian jumlah dari kunjungan wisatawan akan memberi kontribusi yang positif pada Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bangli. 2017. Piutang Pajak Daerah 2016. Bangli.
- Badan Pusat Statistika Provinsi Bali. 2017. Bali Dalam Angka. Bali.
- . 2017. Kabupaten Bangli Dalam Angka. BPS Bali.
- Cohen, Erik. 1984. "The Sociology of Tourism : Approach, Issues and Finding". *Annal of Tourism Reseach*.
- Emmerson Donald K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan The Asia Foundation Indonesia.
- Fajrii, Muhammad, dkk. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 9(2) h: 99-107.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesrsitas Udayana. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Mekanisme Pengujian*. Denpasar
- Hendra.2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 9(1) h: 1-11..
- Irawan, Andi. 2015. Regional Income Disparities In Indonesia:Measurements, Convergence Process, And Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, 51(1) pp:148-149.

- Jaya, Gde Bhaskara Perwira dan Widanta, A.A Bagus Putu. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 3 (5) h:201-208.
- Kesuma, Aprilia. 2015. Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1) h:100-107.
- Lembaga Demografi FE UI. 2000. *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta: Penerbit FE UI.
- Mahmudi. 2010. *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Miranti, Riyana. Duncan, Alan. Cassells, Rebecca. 2014. Revisiting The Impact Of Consumption Growth And Inequality On Poverty In Indonesia During Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, 50(3), 2014: pp: 461–82.
- Oka Arthana Yasa, I Komang. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1) h:129-137.
- Priyanto, Duwi. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*, Yogyakarta, Medikom.
- Sanghee, Park. 2010. The Choice for Scurity in Local Revenue Decisions: A Case for California Counties 2001-2010. *Journal*, pp:1-33.
- Saragih, Juli Panglima. 2003, *Disentralisasi Fiskaldan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Stice, Earl K, James D and Skaousen. 2010. *Akuntansi Keuangan*. Buku I Edisi 16. PT Raja Jakarta: Grafindo Persada.
- Suarta, Nyoman dan I GST Wayan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10 (1). h: 95-107.
- Suryahadi, Asep, Gracia Hadiwidjaja, and Sudarmono Sumarto. 2012. Economic Growth and Proverty Reduction in Indonesia Before and

After The Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesia Economic Studies (BIES)*. 48 (2). pp: 209-226.

Zouhaier, Hadhek. 2012. Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*. 4(2), pp: 152-162.